

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan tentang efektifitas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN menggunakan e-faktur di KPP Pratama Singosari.

Kepatuhan wajib pajak adalah keinginan atau kesadaran diri dari wajib pajak untuk melakukan dan melaksanakan segala perintah maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pajak sehingga dapat dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin baik otoritas pajak dalam memperlakukan wajib pajak maka dapat meningkatkan keefektifitasan dan keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan melaporkan SPT PPN dengan tepat waktu dan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dikemukakan oleh Banowo, Tony dan Yanuar(2013).

Berdasarkan penelitian (Mahyudin, 2015) yang membahas tentang analisis kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bitung diperoleh fakta bahwa e-Registration, e-SPT, e-Filling merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian menurut Khairani dan Mukharromah, (2015:13) PPN merupakan salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem

pelaporan berbasis elektronik. Hal ini dikarenakan pajak pertambahan nilai dalam sistem pengkreditannya bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau dapat memberikan hak restitusi bagi wajib pajak. Ketika pihak penjual memungut pajak pertambahan nilai atas penjualannya dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungut pajak yang nantinya akan diberikan kepada pihak pembeli serta pihak pembeli juga bisa mengklaim kredit pajak atas pajak pertambahan nilai masukan yang telah dibayarkan sehingga dalam hal ini faktur pajak memiliki peran yang penting dalam penggunaannya.

Menurut penelitian (Alfioreta, Purnamawati, & Kartika, 2016) mengemukakan bahwa aplikasi e-Faktur didukung oleh system e-nofa yang merupakan pengembangan dari aplikasi e-SPT. Yang melatarbelakangi DJP membuat aplikasi ini karena masih terdapat banyak penyalahgunaan faktur pajak diantaranya WP non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda, faktur pajak yang terlambat diterbitkan.

Dengan adanya pemberlakuan sistem elektronik untuk faktur pajak ini memiliki tujuan utama agar pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus dapat memproteksi bagi PKP darii pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu penggunaan sistem elektronik untuk faktur pajak ini memudahkan PKP dalam proses pelaporan sehingga dipandang sangatlah memberikan efisiensi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sendiri.

Dari beberapa uraian peneliti-peneliti terdahulu dapat diketahui bahwasannya bahasan antara peneliti terdahulu dengan topik penulis terdapat persamaan. Persamaan bahasan antara peneliti terdahulu dengan topik penulis yaitu membahas tentang efektifitas tingkat kepatuhan

wajib pajak pengusaha kena pajak dalam penggunaan sistem elektronik dalam melaporkan SPT PPN. Para peneliti terdahulu dan topik penulis juga membahas tentang kendala ataupun faktor dan penyalahgunaan wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Sehingga penelitian terdahulu diatas dapat dikatakan relevan dengan topik penulis.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Teori Dasar-Dasar Perpajakan**

#### **a. Definisi Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut para ahli menurut (Sari, 2013) :

##### **1) Prof. Dr. P.J.A. Adriani**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Purwomo, 2010).

##### **2) Dr. M.H.J. Smeets**

Pajak-pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkan dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontra prestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal

husus(individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.

3) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro,SH.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

4) Prof. Dr. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

5) Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

6) Sommerfeld, Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

7) Anderson, W.H.

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- a) Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.
- b) Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Berbeda dengan pembayaran iuran kebersihan, kita akan langsung ditunjukkan atau diberikan imbalan berupa diangkutnya pada waktu-waktu tertentu sampah yang kita tempatkan pada tempat sampah di depan rumah kita atau ditempat pembuangan sampah umum pada suatu komplek perumahan.

Dari berbagai definisi diatas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang

dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya iuran masyarakat kepada Negara. Yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah).
- b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Butir A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
- c) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorang) yang dapat ditunjukan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- e) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
- f) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

## **b. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

a) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c) Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### c. Penggolongan Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

#### 1) Menurut sifatnya

- a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subyeknya). Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Contohnya: Pajak Penghasilan
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dll. Baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya yaitu subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2) Menurut Pembebanannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Contoh: PPh, PBB
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan



pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai

### 3) Menurut Kewenangannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

### d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Pada dasarnya terdapat 3 cara atau sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang yaitu:

#### 1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.

#### 2) *Self assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri yang dimiliki jenis sistem pemungutan ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Contoh: PPh pasal 21, 22, 23, 24.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena dirasa sudah tidak menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan serta masih ada kelemahan dari pajak penjualan itu sendiri, seperti adanya pajak ganda, bermacam-macam tarif (ada 9 tarif) sehingga menyulitkan untuk pelaksanaannya, tidak mendorong ekspor.

Dasar hukum yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tertera pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Mulainya UU PPN ditanggguhkan sampai tanggal 1 Juli 1986 dan ditetapkan peraturan pemerintah.

Menurut (Utomo, 2011), Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pengenaannya berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen. Jadi prinsipnya pajak ini membebaskan jumlah pajak terutang kepada konsumen akhir yang memakai barang atau jasa tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean (didalam negeri) yang dikenakan pada setiap proses produksi dan sidtribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan pola pengenaan ini, maka yang memungut PPN tidaklah pihak yang terbeban walaupun sebelumnya ia dikenakan PPN yang disebut sebagai Pajak masukan, namun berdasarkan mekanisme yang berlaku, PPn yang dikenakan sebelumnya itu dapat dikreditkan. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 25, pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

**b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

**1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) didalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP/JKP berwujud atau tidak berwujud. Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi 4,8 M (miliar) dalam satu tahun.

**2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)**

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 M dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban untuk wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang sebagaimana halnya PKP.

- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/JKP
- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi
  - b) Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha
  - c) Bangunan bersifat permanen
  - d) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate
  - e) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 5) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. (Mardiasmo, 2011)

**c. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

- 1) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU PPN).
- 2) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984

**d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah tarif proporsional yang tidak memperhatikan *ability to pay*, sehingga mencerminkan keadilan. Tarif yang digunakan adalah tarif tunggal (*single rate*) atau disebut juga tarif seragam (*uniform rate*) atau flat rate.

Besarnya tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) sedang tarif PPN untuk ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen)

Tarif PPN menurut ketentuan UUD No. 42 tahun 2009 pasal (7):

- 1) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen)

diterapkan atas:

- a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c) Ekspor Jasa Kena Pajak

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

3. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan untuk dana pembangunan maka tarif PPN berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

**e. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

- 1) Setiap PKP menyerahkan BKP/JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran.
- 2) Pada saat PKP tersebut diatas membeli BKP atau menerima JKP dari pengusaha kena pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan.
- 3) Pada suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan

berikutnya setelah masa pajak terakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (Resmi, 2013)

Contoh: Selama bulan Februari 2016. Melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp12.470.000.000, Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp12.500.000.000

Maka : Masa Pajak Februari 2015

Pajak Keluaran = Rp 1.250.000.000

Pajak Masukan = Rp 1.247.000.000

PPN disetor ke Kas Negara = Rp 3.000.000

- 4) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kompensasi merupakan suatu proses mmperhitungan kelebihan pajak (LB) terhadap kekurangan pembayaran pajak kurang bayar (KB) dari suatu masa pajak ke masa pajak lainnya.

Contoh : Masa Pajak Januari 2016

Pajak Keluaran = Rp 2.150.000.000

Pajak Masukan = Rp 2.152.500.000

Lebih Bayar = Rp 2.500.000

Masa Pajak Februari 2016

Pajak Keluaran = Rp 2.250.000.000

Pajak Masukan = Rp 2.247.000.000

Kurang Bayar = Rp 3.000.000

Kompensasi Kelebihan

Bulan Januari 2016 = (Rp 2.500.000)

Bayar Februari = Rp 500.000

### 3. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan peyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena Impor Barang Kena Pajak. (Pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No.84/PMK/.03/2012 dan Pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib bagi orang pribadi maupun badan jika sudah memiliki faktur pajak dianggap telah membayar termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan PKP penjual. Bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan PKP dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila faktur pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Terdapat 3 jenis faktur pajak menurut Undang-Undang PPN:

- a. Faktur Pajak Standar, adalah faktur pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh Peraturan Undang-Undang serta untuk mengkreditkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk bukti pajak tersebut. Faktur pajak masukan standar paling sedikit memuat keterangan tentang :
  - 1) Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak;
  - 2) Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak;
  - 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
  - 4) Pajak pertambahan nilai yang dipungut
  - 5) Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
  - 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak



7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

**b. Faktur Pajak Sederhana**, adalah faktur yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu PKP dapat membuat faktur sederhana, dalam hal PKP melakukan :

- 1) Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir.
- 2) Pembeli BKP/penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya : pembeli yang tidak diketahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP-nya) atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya.
- 3) Faktur pajak sederhana sekurang-kurangnya harus memuat:
  - Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP/JKP.
  - Macam, jenis dan kuantum dari BKP/JKP.
  - Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
  - Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana
- 4) Bentuk faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan .
- 5) Faktur pajak sederhana dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua :
  - Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP/penerima JKP.
  - Lembar ke-2 : Untuk arsip PKP yang bersangkutan.
- 6) Faktur pajak sederhana dianggap telah dibuat rangkap dua atau lebih, dalam hal faktur pajak sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang

disediakan untuk disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis.

- 7) Faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan.
- c. Faktur Pajak Gabungan, adalah faktur pajak standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP. Bentuk faktur pajak ini sama dengan faktur pajak standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya yaitu faktur pajak standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi sedangkan faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak gabungan juga dapat dikreditkan dengan pajak keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai hanya faktur pajak sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

Faktur pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
3. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP;
5. Saat ini yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Peran penting faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah

melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

#### **4. E-faktur**

Kementrian keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-faktur dan tertulis (hardcopy) – PMK Nomor 151/PMK.011/2013. Aplikasi e-faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Berikut beberapa peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya:

- a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Latar belakang terbentuknya e-faktur dikarenakan faktur pajak banyak yang disalahgunakan, diantaranya :

- a. Penerbitan faktur pajak oleh Wajib Pajak non PKP yang tidak berhak menerbitkan atau belum dikukuhkan PKP;
- b. Faktur pajak fiktif;
- c. Faktur pajak yang terlambat diterbitkan;
- d. Kepatuhan PKP yang menurun sehingga penerimaan PPN kurang optimal dan juga beban administrasi faktur pajak;

e. Faktur pajak ganda.

Penyalahgunaan tersebut merupakan pelanggaran yang masuk ke dalam kategori tindak pidana perpajakan. Banyak pihak yang dirugikan oleh penyalahgunaan faktur pajak itu, maka untuk mengatasi penyalahgunaan faktur pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan elektronik faktur pajak atau yang disingkat E-Faktur Paja (E-Faktur)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan E-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan E\_Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan E-Faktur secara nasional dan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah diwajibkan membuat E-Faktur tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai surat edaran Nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik Serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak (E-Faktur). Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitasnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Fungsi dari sertifikat elektronik sendiri adalah sebagai alat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi layanan permintaan nomor seri faktur pajak dan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik untuk

pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik. E-faktur ini akan langsung masuk ke system yang akan memproses rekapitulasi yang tidak lagi menunggu hingga sebulan faktur pajak. PKP akan diberikan ID sebagai pengenalan dan password. E-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.

Tujuan utama dari pemberlakuan E-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan E-Faktur pajak dilengkapi dengan pengamanan berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak. Pemantauan yang dilakukan terkait dengan faktur pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal karena pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) sehingga pelaporannya lebih bersifat *real-time*.

Manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan E-Faktur adalah dari segi kenyamanan yaitu tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik. E-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, E-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan. E-Faktur pajak juga untuk membuat SPT PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk pelaporan SPT PPN.

Apabila hasil cetak E-Faktur rusak atau hilang, PKP yang membuat E-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi

atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu PKP dapat mengajukan permintaan data E-Faktur ke DJP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat permintaan data E-Faktur (terbatas pada data E-Faktur yang telah diunggah/upload ke DJP dan telah mendapat persetujuan dari DJP).

Teknologi elektronik ini juga akan memudahkan penyimpanan dokumen-dokumen pajak milik wajib pajak yang telah dilakukan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.

## **5. Surat Pemberitahuan**

### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan adalah surat oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Objek pajak atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

### **b. Jenis Surat Pemberitahuan**

Terdapat 2 jenis surat pemberitahuan :

#### **1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)**

SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. Terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut diatur berdasarkan nomor pasal, aturan pajak yaitu :

- a) PPh Pasal 21/26;
- b) PPh Pasal 22;

- c) PPh Pasal 23/26;
- d) PPh Pasal 25;
- e) PPh Pasal 4 ayat (2);
- f) PPh Pasal 15;
- g) PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- h) PPN bagi Pemungut;
- i) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
- j) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

Spt Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

**c. Fungsi Surat Pemberitahuan**

1) Bagi Wajib Pajak

Sarana wajib pajak untuk mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak;
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c) Harta dan Kewajiban;
- d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut terhadap wajib pajak pribadi atau badan sari suatu masa pajak;

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan da mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarann; dan
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3) Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

(Alban, Leandri; 2016)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 3 Undang-undang KUP juga menjelaskan bahwa kewajiban bagi setiap WP adalah untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab. Satuan mata uang rupiah, menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah :

- 1) Benar, adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan;
- 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. (Pasal 3 UU KUP ayat 1)

## 6. SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus diisi menggunakan E-Faktur dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, disampaikan setiap bulannya. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak,



juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut (Sukardji, 2000).

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0) tetap harus dilaporkan jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan (Alban Leandri; 2016)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-Filing*. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *e-SPT*. Sesuai pasal 1 angka 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam (Rusjdi, 2003), **Surat Pemberitahuan** adalah :

### **Pasal 1**

#### **Angka 11**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Angka 12**

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

### Angka 13

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

**Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP

**Tahun Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

**Bagian tahun pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

#### a. Prosedur Penyampaian SPT Masa PPN

- 1) PKP melakukan perhitungan dan pelaporan pada pemungutan PPN dengan menginput data Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran di e-Faktur.
- 2) Pembayaran/penyetoran pajak pada Kantor Pos dan Giro, Bank Pemerintah (kecuali BTN), Bank Pembangunan Daerah, Bank Devisa, Bank bank lain penerima setoran pajak, Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Khusus untuk import tanpa Laporan Kas Posisi.
- 3) PKP melakukan pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN di e-Faktur dan print. SPT harus diisi lengkap, benar dan ditandatangani oleh pengurus atau direksi untuk wajib pajak badan.
  - Dalam hal SPT ditandatangani oleh orang lain, selain pengurus atau direksi harus dilampiri Surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus untuk SPT Masa PPN dibuat per masa pajak dengan menyebut bulan yang bersangkutan, jadi tidak dapat dibuat untuk satu tahun buku.

- SPT harus disampaikan dengan lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan. SPT yang disampaikan tidak lengkap, dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan.
- 4) PKP melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak ditempat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- 5) PKP akan menerima catatan tanda terima pada lembar kedua SPT Masa PPN paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
- 6) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanggal Cap Pos dari Kantor Pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT Masa PPN.
- 7) DJP melakukan pengolahan data untuk pelayanan dan pengawasan (Muh. Jupriyanto; 2016)

**b. Sanksi SPT Masa PPN Tidak Disampaikan**

Dalam (Sukardi, 2010) SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- 1) Denda administrasi SPT Masa PPN Rp 500.000,-
- 2) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Maka jumlah pajak yang kurang bayar/setor ditagih dengan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% untuk PPN dan PPnBM (Pasal 13 Ayat 3 UU KUP).

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang bestatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

- 4) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- 5) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- 7) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- 8) Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: keusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisisme, perang antar suku atau kegagalan system komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

**c. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak (Pandiangnan, 1993)

**7. Kepatuhan Perpajakan**

**a. Pengertian Kepatuhan Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak ini adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. Semakin besar *tax ratio* mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan

dijalankan. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Kewajiban perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak. Dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban pajak ini tidaklah mudah dilakukan wajib pajak. Berjalannya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan yang jelas, adil dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana tidak berbelit-belit. Administrasi perpajakan dituntut pula untuk benar-benar transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan terpuji, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan bertanggungjawab.

Pada akhirnya orang atau badanlah sebagai subjek pajak yang melaksanakan pembayaran pajak tersebut. Dengan sistem ini sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang sudah bergeser ke wajib pajak. Dengan demikian efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab seorang pajak. Kesadaran masyarakat dalam kepatuhan perpajakan yang menjadi hal utama dalam proses jalannya sistem *self assessment*. Perilaku penghindaran pajak cenderung menjadi bagian dari perilaku warga masyarakat dalam melakukan pemenuhan tindakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah menyangkut sejauh mana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib

pajak. *Tax gap* ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul, sebagaimana dinyatakan James and Alley (1999). Dalam praktik pemahaman ini terus berkembang ke berbagai pengertian dan bahkan lebih kompleks sejalan dengan kepentingan masyarakat. Perkembangan dunia bisnis yang terus berubah secara cepat seiring dengan dinamika perubahan perekonomian menuntut pula terus-menerus perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam ketentuan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan lebih merujuk pada bagaimana sikap membayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi hukum pajak. Oleh karena itu, derajat ketidakpatuhan pajak diukur dengan berapa kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%.

Definisi diatas dianggap terlalu sederhana, karena dalam implementasinya keberhasilan administrasi pajak disertai pula dengan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan fiskus, ancaman atau sanksi hukum. Kepatuhan pajak baru akan terealisasi setelah dilakukan tindakan penegakan hukum. Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela, yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktifitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Sebagai konsekuensi menjadi benar bahwa pengertian kepatuhan pajak sukarela adalah mencakup tidak saja kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan apa yang tersurat dalam aturan

pajak, tetapi juga termasuk konsistensi semangat melaksanakan dari pada apa yang tersirat dai aturan pajak.

Dalam kaitannya dengan faktor ketaatan/kepatuhan tersebut, perilaku wajib pajak cenderung untuk melakukan kegiatan menghindar atau mengelak dari kewajibannya. Dengan demikian bagi seorang wajib pajak tentu akan memperhitungkan faktor resiko untuk menghindar. Sebagaimana dinyatakan Allingham dan Sandmo (1972), pembayran pajak yang memiliki sikap rasional demikian, ketika mendeklarasikan tingkat pendapatan dalam SPT akan dipengaruhi beberapa faktor risiko menghindar, yaitu faktor besarnya pendapatan, faktor terdeteksi untuk dilakukan pemeriksaan, faktor tarif dan faktor sanksi akibat kesalahan. Upaya wajib pajak untuk menghindar dari kewajiban pajak ini, buhkan sudah terencana dengan baik. Oleh karenanya, setiap perencanaan pajak haruslah selalu di dalam koridor ketentuan pajak. Setiap upaya perencanaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan karenanya dianggap tidak mencerminkan kapetuhan pajak sukarela (Simanjuntak, 2012)

#### **b. Tingkat Kepatuhan Pajak**

Tingkat kepatuhan wajib pajak paling baik atau ideal dimana wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka sebagai strategi kepatuhan terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus-menerus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik. Saat ini DJP memiliki tenaga AR (*Account Representative*) yang dapat berperan aktif sesuai perannya dalam membina wajib pajak, memberikan penyuluhan, informasi yang diperlukan, sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat kesadaran yang sangat baik wajib pajak akan terus secara konsisten menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi bila terdapat pelayanan yang baik dar aparat

perpajakan. Wajib pajak mengetahui dengan benar untuk selalu menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan aturan yang benar.

Pada tingkat kepatuhan pajak dimana wajib pajak yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang menghindari pajak walau tidak selalu berhasil. Keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat berakibat melanggar aturan pajak. Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta aturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti dan bagi yang melanggar terkena sanksi sesuai ketentuan. Wajib pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan berdampak pada gagalnya penegakan kepatuhan pajak dengan baik. Dalam konteks ini strategi kepatuhan pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada itikad baik wajib pajak dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar. Dengan strategi ini diharapkan dikemudian hari wajib pajak akan membatalkan niatnya untuk menghindari pajak, sehingga kembali dapat meningkatkan kepatuhannya.

Tingkatkan kepatuhan pajak dimana wajib pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak selalu dengan aktif menghindari memenuhi kewajibannya dengan alasan berbeda-beda. Masalah perbedaan perlakuan pajak akibat masih dirasakannya ketidakadilan aturan, prosedur administrasi pelaporan pajak yang dirasakan masih rumit mendorong wajib pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sebaliknya gejala ini dapat pula diakibatkan oleh keberadaan usaha wajib pajak yang menurun, sehingga kewajibannya pajak menjadi tertunda. Demikian pula



perilaku curang sebagian wajib pajak dapat mendorong wajib pajak lainnya bertindak sama.

Secara implementatif pola ketidakpatuhan ini dipahami sebagai cara menghindar yang sengaja dilakukan wajib pajak dalam upaya mengurangi, atau bahkan tidak membayar pajak yang seharusnya. Memahami bahwa pajak adalah suatu kewajiban maka tidak bisa lain bahwa dalam situasi apapun bilamana potensi penghasilan menunjukkan harus ada kewajiban pajak yang harus dibayar, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan adalah upaya pencarian fakta-fakta yang menjadi alasan bagi wajib pajak untuk menghindar. Demikian pula menemukan informasi, data-data terkait potensi penyimpangan aturan pajak. Informasi atau data akurat terkait penyimpangan perpajakan yang ditemukan kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik berupa surat teguran atau peringatan lainnya.

Tingkat kepatuhann pajak pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Fenomena ini menunjukkan seolah ada dan bisa sebagian wajib pajak berada diatas undang-undang atau aturan perpajakan. Segala upaya dilakukan waijb pajak untuk menghindar pajak, bahkan penyelundupan atau menggelapkan pajak yaitu denga sengaja melanggar aturan perpajakan. Dalam kondisi ini pajak yang seharusnya merupakan kewajiban menjelma menjadi suatu hal yang tidak penting dan dapat diabaikan begitu saja. Efektivitas penerimaan pajak menghadapi tantangan berat untuk itu tindakan antisipasi benar-benar harus menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan hukum menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana

ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal (Simanjuntak, 2012).

**c. Faktor Utama Kepatuhan Pajak**

**1) Teori Risiko Menentang**

Teori standar tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat keridakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak. Berdasarkan teori ini beberapa faktor utama kepatuhan pajak antara lain:

- a) Pendapatan yang tetap
- b) Tarif Pajak
- c) Probabilitas dilakukan pemeriksaan
- d) Besarnya sanksi yang mungkin dikenakan

**2) Teori Moral Pajak**

Frey (1997) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Menurut pendapat ini moral pajak dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi moral pajak seperti:

- a) Persepsi adanya kejujuran
- b) Sikap membantu atau melayani dari aparat
- c) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
- d) Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

#### **d. Indikator Kepatuhan Pajak**

Dalam praktik pelaksanaannya yang berlangsung saat ini pada DJP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek penghasilan wajib pajak, sbagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek pengenaan sanksi, sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

